



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prihartati  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Agus Toyib  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Banten

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Tangerang

  
Agus Toyib  
NIP. 19630617 198503 1 002

  
Prihartati  
NIP. 19701019 199303 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG**  
**DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	40%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60%
		3. Persentase menurunnya residivis	1%
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70,0
4.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	75
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	75
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	40
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	60
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	60
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	70
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%
		Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	25%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
	Rehabilitasi Narkokita	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 5.056.580.000,-</b>
<b>Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</b>	<b>Rp. 5.056.580.000,-</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 5.687.000.000,-</b>
<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan</b>	<b>Rp. 5.687.000.000,-</b>

Serang, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Banten

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIA Tangerang



Agus Toyib  
NIP. 19630617/198503 1 002



Prihartati  
NIP. 19701019 199303 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prihartati  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 10 Februari 2021

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Tangerang

Prihartati  
NIP. 19701019 199303 2 001